

Harapan Baru, Presiden Baru

Oleh Gatut Priowidodo, Ph.D.

Kemenangan memiliki seribu ayah, sementara kekalahan, tragisnya diibaratkan sebagai yatim piatu, sepertinya menemui legalitas. Meskipun MK baru memutus perkara gugatan pasangan Prabowo-Hatta tanggal 22 Agustus 2014, satu per satu anggota Koalisi Merah Putih mulai berangsur mencari selamat sendiri-sendiri. Selisih 8 juta suara lebih, seolah meniscayakan Jokowi-JK bakal melanjutkan estafet kepemimpinan nasional pasca SBY yang telah dua kali memerintah. Dari sembilan agenda prioritas (*nawa cita*) yang merupakan hasil perasan 31 agenda strategis tiga bidang (politik 12 agenda, ekonomi 16 agenda dan kepribadian-budaya 3 agenda), tampak jelas bahwa Jokowi-JK sebagai Presiden Terpilih memiliki tugas yang amat berat dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Tiga Masalah

Paling tidak ada tiga masalah pokok bangsa yang harus dijadikan perhatian bersama. Pertama, ancaman terhadap wibawa negara. Kedua, kelemahan sandi perekonomian bangsa. Ketiga intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Formulasi persoalan tersebut tampaknya sederhana namun sesungguhnya sangat kompleks bahkan cenderung membentuk labirin yang entah darimana harus diurai.

Ceritera sukses dimasa lalu baik selaku walikota Solo dua periode maupun gubernur DKI (yang akan ditinggalkan) setelah dilantik menjadi Presiden RI ke-7 pada 20 Oktober nanti hanyalah menunjukkan 'good practices'. Di depan terbentang persoalan bangsa yang maha berat untuk diselesaikan. Pemimpin terpilih harus berani dan mampu mengurai persoalan yang rumit tersebut menjadi poin-poin sederhana yang mudah dijabarkan di lapangan.

Kedaulatan laut dan udara misalnya, harus ada skala prioritas. Berpuluh-puluh tahun upaya membangun kedigdayaan di laut dan udara menjadi mimpi besar bangsa ini. Akankah ditangan pemimpin baru nanti, ada perubahan revolusioner yang mampu menegaskan jatidiri bangsa maritim dengan semboyan *jalesveva jayamahe*? Dan digdaya di udara dengan semangat *swa bhuwana paksa*? Pencurian ikan dan mudahnya territorial laut diinfiltrasi kekuatan asing seolah tugas rumah yang sangat sulit. Lebih menyedihkan lagi, tiga wilayah udara Indonesia yakni Batam, Tanjung Pinang dan Karimun, serta Natuna hingga saat ini masih dibawah kontrol otoritas udara Singapura. Dimana wibawa negara dipertaruhkan jika situasi seperti ini tidak selekasnya dituntaskan?

Tak kalah memprihatinkan, bila bangsa ini membicarakan ekonomi dan kesejahteraan bangsanya. Bonus demografi berupa surplus usia produktif, lagi-lagi berhadapan dengan kesempatan kerja dan kualitas SDM yang rendah. Implikasinya, karena tidak tertampung di

pasar tenaga kerja domestik, mereka mengadu nasib sebagai tenaga kasar di luar negeri. Pada saat yang sama, proteksi negara bila mereka ketimpa masalah sangat minim. Anggaran yang disediakan, selalu tidak berbanding lurus dengan devisa yang diterima negara sebagai imbal hasil peluh keringat mereka. Serba ironis memang. Sementara janji menciptakan lapangan kerja harus pula seiring sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kapan sebuah negara tidak prospek dalam iklim investasi, maka investor asingpun enggan menanamkan modalnya di sana. Situasi dilematis seperti ini, tentu memerlukan *'leadership skill'* yang mampu memberi terobosan-terobosan inovatif.

Pada saat yang hampir bersamaan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, Indonesia juga harus menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean 2015, dan AFTA 2019-2020. Apa yang bisa diandalkan bila kualitas ketrampilan kerja SDM kita rendah atau tidak *'well educated'*? Tentu kita hanya akan menjadi penonton dan buruh kasar di negeri sendiri. Migrasi ekspatriat, bukan hanya menyasar sektor pekerjaan berketrampilan tinggi, namun akan merambah ke multisektor. Buruh di Indonesia yang banyak menuntut dan demo, menjadi alasan penguat pabrik-pabrik PMA hengkang ke Cina dan Vietnam karena buruhnya bisa dibayar murah.

Mencermati fakta sosial seperti itu, pemimpin baru harus inspiratif. Ia harus mampu memberi tawaran kreatif agar terbuka peluang usaha produktif yang kongkrit. Janji mencetak sawah baru dua juta hektar, masihkah itu relevan dengan profesi impian generasi digital saat ini? Jangan-jangan yang diproduksi adalah padi-padian dengan panen ratusan ton per hektar tanpa hama apapun, karena ditanam di persawahan virtual?

Masalah ketiga yang perlu eksplorasi adalah intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Lagi-lagi masalah terakhir ini tidak bisa dibilang sepele. Intoleransi tidak saja memperlumahkan *'kita'* yang sama (agama, etnik, suku, ras dan golongan) dengan *'kamu'* yang berbeda terhadap lima hal tersebut. Tetapi juga diantara *'kita'* yang sama baik secara agama tetapi beda mazhab, beda doktrin, beda aliran, beda dogma, ataupun beda keturunan pemimpin. Ada upaya sistematis yang dikonstruksi alam bawah sadar kita untuk tindakan penonjolan dalam spirit *'primus inter pares'*. Yang sama dengan mayoritas adalah benar dan yang berbeda dengan yang mayoritas karena dia minoritas adalah salah. Ideologi berpikir seperti ini yang patut diberi pencerahan.

Kasus Susan Jasmine Zulkifli yang terpilih sebagai Lurah Lenteng Agung melalui proses lelang jabatan menuai protes dari beberapa orang karena lurah Susan beragama Kristen, yang dianggap tidak sesuai dengan sebagian besar warga Lenteng Agung yang beragama Islam. Terlebih lagi lurah dimaknai sebagai Imam, maka ia tak layak. Bahkan karena berlarut-larut, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Jokowi mempertimbangkan ulang pengangkatan lurah Susan. Namun, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak akan menurunkan lurah Susan atas dasar agama dan hanya akan mempertimbangkan kinerjanya sebagai lurah (www.jokowi.id).

Adalah contoh betapa tidak mudah menghayati dan memaknai heterogenitas dalam tataran praktis pada sebagian anak bangsa. Status yang berkarakter '*ascribed*' kerap kali masih dipersoalkan lantaran berbeda dengan golongan mayoritas. Bila kondisi seperti ini terus dilanggengkan, tidak tertutup kemungkinan akan mengakumulasi energi destruktif yang menstimulasi disharmoni kehidupan sosial. Ujung-ujungnya akan terjadi ledakan sosial yang merugikan kita sebagai bangsa yang menjunjung semangat pluralitas.

Penutup

Indonesia ditunen dari rajutan benang penuh kebhinekaan. Ia bukan monopoli segelitir golongan yang secara populatif besar dan mendeterminasi warna dan arah. Tapi bangsa ini harus bisa sepakat untuk bergerak bersama meniti litan panjang perjuangan menuju keadilan dan kesejahteraan semua elemen bangsa tanpa diskriminasi.

Menjadi penghela gerbong bangsa anti diskriminasi ditengah krisis kepribadian bangsa, bukanlah persoalan mudah. Tapi itulah amanat rakyat yang disematkan pada dua pemimpin bangsa terpilih Jokowi-JK. Lima tahun kedepan, bukan saja sebagai arena '*test case*' tetapi juga kurun waktu yang sangat krusial untuk melakukan konsolidasi politik dan rekonsiliasi komponen bangsa menuju Persatuan Indonesia yang kokohb. Menjadikan Indonesia rumah bersama adalah mimpi indah seluruh komponen anak bangsa. Ia hanya bisa terwujud bila Presiden baru bukan sekedar pemimpin koalisinya tetapi adalah sang pengayom, sang penegak keadilan dan suri teladan seluruh penghuni negeri ini.

***Gatut Priowidodo, Ph.D Ketua PKKP (Pusat Kajian Komuksi Petra) dan Dosen Fikom UK Petra Surabaya**